

PENATAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KAMPUNG YAKONDE DISTRIK WAIBU KABUPATEN JAYAPURA

Yudith N.A. Karetji¹, Dortehea Renyaan^{2*}, Ibrahim K. Kendi³, Hiskia C.M. Sapioper⁴,
Ilham⁵ Marlin Rumbiak⁶

¹) Program Studi Manajemen Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Cenderawasih

²) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih

³) Program Studi Manajemen Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Cenderawasih

^{4,5}) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih

⁶) Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Cenderawasih

e-mail: renyaandortehea14@gmail.com

Abstrak

Kegiatan ini bertajuk "Penataan dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kampung Di Kampung Yakonde Distrik Waibu Kabupaten Jayapura". Kegiatan ini menggunakan metode partisipatif dan edukatif, dengan tiga tahapan, yaitu; tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman perangkat kampung dalam mengelola data administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, dan administrasi pembangunan, serta adanya buku pedoman administrasi umum di Kampung Yakonde Distrik Waibu Kabupaten Jayapura sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa aparatur Kampung Yakonde telah memahami dengan baik dan benar tentang administrasi pemerintahan kampung dan dapat mengisi ke dalam buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan, buku administrasi pembangunan. Sebagai rekomendasi aparatur pemerintahan Kampung Yakonde agar dapat dapat secara terus menerus melakukan pendataan sehingga pada saat mengisi data-data menggunakan informasi yang terbaru. Sebab, dengan adanya informasi terbaru secara terus menerus maka diharapkan pelayanan kepada masyarakat di Kampung Yakonde dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: Penataan, Pengelolaan, Administrasi, Pemerintahan Kampung

Abstract

This activity was titled "Organization and Management of Village Government Administration in Yakonde Village, Waibu District, Jayapura Regency". This activity uses participatory and educative methods, with three stages, namely; initial stage, core stage and final stage. The purpose of this activity is to increase the understanding of village officials in managing general administration data, population administration, financial administration, and development administration, as well as the existence of a general administration manual in Yakonde Village, Waibu District, Jayapura Regency in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 47 of 2016 concerning Government Administration Village in providing services to the community. The results of this activity showed that Yakonde village officials had a good and correct understanding of village government administration and were able to fill in general administration books, population administration books, financial administration books, development administration books. As a recommendation for Yakonde Village government officials to be able to continuously collect data so that when filling in the data, use the most recent information. Because, with the latest information continuously it is expected services to the community in Kampung Yakonde can run well.

Keywords: Structuring, Management, Administration, Village Governance

PENDAHULUAN

Lembaga pemerintahan yang paling bawah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan pemerintahan desa. Istilah desa dalam konteks Papua disebut kampung (Yumame et al., 2020), karena memiliki peran yang sangat strategis pemerintah kemudian melahirkan kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya regulasi tersebut

memberikan ruang keleluasaan bagi desa dalam menjalankan “*local self government*” atau kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Septiani, 2021). Kewenangan ini biasa juga disebut dengan istilah otonomi desa. Dalam rangka menjalankan otonomi desa yang efektif, maka tentunya memerlukan kapasitas dari aparatur desa yang memadai (Pemprov Jawa Timur, 2019).

Dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan desa/kampung, dapat dilakukan melalui tertib administrasi. Aparatur desa/Kampung memahami betul akan tugas dan fungsinya khususnya terkait dengan penyelenggaraan administrasi desa agar setiap program yang ada dapat dijalankan dengan baik (Lalenoh, 2018). Akan tetapi, aparatur pemerintahan desa saat ini diperhadapkan pada persoalan keterbatasan kapasitas untuk menyusun tertib administrasi di desa secara benar (Islami, 2016). Diketahui bahwa, administrasi pemerintahan desa merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana administrasi berpengaruh terhadap kelancaran jalannya roda pemerintahan (Khumaidi, 2020).

Secara sederhana administrasi ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mencatat. Secara luas, administrasi dapat diartikan sebagai suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, merujuk Siagian, dalam Septiani (2021) administrasi dipahami sebagai proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berangkat dari definisi tersebut, maka dalam menjalankan pemerintahan kampung maka administrasi memiliki peran penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tentunya selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Menurut Pilo et al. (2022) bahwa sebagai garda terdepan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maka desa harus dibekali dengan tata kelola administrasi yang baik.

Menurut Nurcholis administrasi desa atau kampung merupakan proses kegiatan pencatatan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang selanjutnya dicatat dalam buku administrasi desa/kampung (Septiani, 2021). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2016 dijelaskan bahwa “Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa”. Pada pasal (4) disebutkan pula bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dilakukan melalui: a. Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa; dan b. Pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.

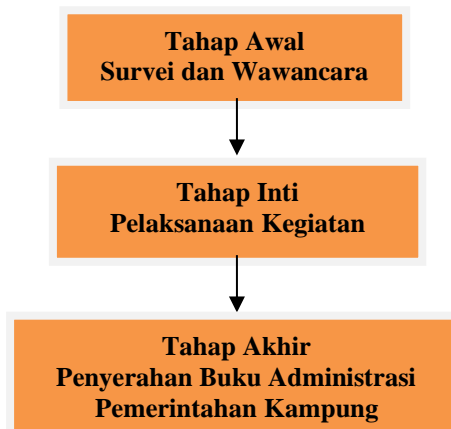
Berbicara mengenai tertib administrasi desa, menurut Septiani (2021) jika fakta yang ada di lapangan belum menunjukkan jika semua desa mampu untuk menerapkan tertib administrasi desa. Hal yang sama juga terjadi di Kampung Yakonde, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Dimana kurangnya pemahaman aparatur kampung di Kampung Yakonde terkait administrasi pemerintahan kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, serta belum adanya buku pedoman administrasi pemerintahan desa seperti buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan dan buku administrasi pembangunan kampung. Berangkat dari uraian tersebut, maka penting untuk dilakukan Kegiatan pengabdian Masyarakat (PkM) dengan tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan pemahaman perangkat kampung dalam mengelola data administrasi umum.
- Meningkatkan pemahaman perangkat kampung dalam mengelola data administrasi penduduk.
- Meningkatkan pemahaman perangkat kampung dalam mengelola data administrasi keuangan.
- Meningkatkan pemahaman perangkat kampung dalam mengelola data administrasi pembangunan.
- Adanya buku pedoman administrasi umum di Kampung Yakonde Distrik Waibu Kabupaten Jayapura sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

METODE

Dalam melakukan suatu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) maka penting adanya metode yang digunakan. Metode ini menjadi suatu keniscayaan sebagai alat mencapai tujuan kegiatan sebagaimana yang direncanakan (Ilham et al., 2020). Olehnya itu, kegiatan ini menggunakan metode partisipatif dan edukatif. Partisipatif merupakan pelibatan aparatur kampung dari tahapan perencanaan, proses pelaksanaan, hingga pada tahap evaluasi setiap program kerja. Sedangkan edukatif merupakan upaya memasukkan unsur pendidikan pada pelaksanaan kegiatan (Yumame et al., dalam Ilham et al., 2021). Selanjutnya, fasilitasi dilakukan dalam rangka pembuatan buku administrasi pemerintahan desa yang terdiri dari buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan

dan buku administrasi pembangunan secara lengkap. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap; tahap awal, tahap inti dan tahap akhir.



**Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
(Renyaaan & Sriyono, 2020)**

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Langkah-langkah Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yakni;

- **Tahap awal**
Kegiatan yang dilakukan adalah survey dan wawancara kepada aparatur kampung terkait kelengkapan administrasi serta merancang kegiatan inti.
- **Tahap inti**
Tahap ini adalah tahap pelaksanaan kegiatan yaitu pelatihan kepada kepala kampung dan aparatur kampung mengenai Buku Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, dan mendampingi pembuatan buku administrasi umum secara lengkap.
- **Tahap akhir**
Kegiatan dalam tahap ini yaitu penyerahan Buku Administrasi Pemerintahan Desa yang terdiri dari Buku Administrasi Umum, Buku Administrasi Penduduk, Buku Administrasi Keuangan dan Buku Administrasi Pembangunan. Pada tahap ini, Tim Pengabdian menyerahkan Buku Administrasi Pemerintahan Desa kepada Kepala Kampung Yakonde dan disaksikan oleh aparatnya.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Berikut adalah rincian pelaksanaan kegiatan:

- **Hari pertama**
Pada hari pertama tim pelaksana turun langsung ke Kampung Yakonde dengan tujuan untuk bertemu kepala kampung. Pertemuan ini dalam rangka membicarakan tentang administrasi pemerintahan kampung. Dari hasil pertemuan tersebut, terungkap bahwa belum adanya pemahaman aparat dan kepala kampung terkait dengan administrasi pemerintahan kampung. Sebagai contoh bahwa yang ada di kampung Yakonde hanya buku surat masuk dan buku surat keluar sedangkan yang lainnya tidak ada, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016. Berdasarkan temuan ini, maka tim pelaksana membuat rancangan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya yaitu kegiatan inti.
- **Kegiatan hari kedua**
Pemberian materi sekaligus pelatihan terkait Penataan Buku Administrasi Pemerintahan Kampung. Materi yang disampaikan adalah mengenai administrasi pemerintahan desa/kampung

yang terdiri dari: Buku Administrasi Umum, Buku Administrasi Penduduk, Buku Administrasi Keuangan dan Buku Administrasi Pembangunan. Adapun hasil yang didapat adalah aparat Kampung Yakonde Distrik Waibu Kabupaten Jayapura dapat memahami dan mengerti tentang administrasi pemerintahan desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Selanjutnya, pada tahap akhir kegiatan dilakukan penyerahan Buku Administrasi Pemerintahan Kampung yang diterima langsung oleh kepada Kepala Kampung Yakonde didampingi oleh aparat kampung. Buku Administrasi Pemerintahan Desa yang diserahkan berupa 14 buku administrasi umum dan administrasi penduduk.



Gambar 2. Penyampaian Materi Administrasi Pemerintahan Kampung

3. Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari berlangsung dengan baik mulai dari tahap awal, inti hingga tahap akhir. Dalam kegiatan penyampaian materi mengenai administrasi pemerintahan desa diikuti oleh kepala kampung dan aparat Kampung Yakonde Distrik Waibu Kabupaten Jayapura. Dimana dalam pelaksanaannya diikuti oleh para peserta dengan antusias. Mereka berharap dengan adanya kegiatan ini, maka kedepannya dengan dukungan administrasi kampung yang benar akan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kampung yang lebih baik. Sebagaimana Alrasyid et al. (2021) mengatakan bahwa agar dapat menciptakan pemerintahan desa (kampung) yang baik, maka pemerintahan desa musti didukung pula sistem administrasi desa yang benar.



Gambar 3. Diskusi dengan Aparatur Kampung

Kaitannya dengan pelatihan tersebut, menurut Sekretaris Kampung Yakonde bahwa dari tahun 2012 sampai saat ini mereka baru mendapatkan materi kaitannya dengan pelatihan penyusunan administrasi pemerintahan kampung. Sejauh ini aparat kampung belum pernah mendapatkan pelatihan baik dari Pemerintah Kabupaten Jayapura ataupun dari Pemerintah Distrik. Selain itu, aparat kampung

juga membeberkan jika mereka tidak paham apa yang dimaksud dengan buku agenda surat masuk dan surat keluar tetapi dengan adanya pelatihan ini mereka jadi paham betapa pentingnya buku agenda dan buku jumlah penduduk dalam membuat kegiatan di kampung.

Merujuk Mouw & Keradjaan (2016) bahwa sesungguhnya proses pencatatan data dan informasi tidaklah susah untuk dilakukan jika semua perangkat desa memiliki komitmen dan tekun di dalam melakukan pengisian. Kendati demikian, hal ini dapat dilaksanakan ketika didukung pula dengan pengetahuan yang mumpuni kaitannya dengan administrasi desa/kampung. Olehnya itu, setelah mengikuti kegiatan pelatihan para aparatur kampung telah mampu memahami terkait dengan administrasi pemerintahan kampung. Kegiatan ini telah memberikan manfaat kepada aparatur kampung dalam rangka penataan dan pengelolaan administrasi kampung yang lebih baik, dimana Kepala Kampung Yakonde dan aparat kampungnya telah mampu mempraktekkan cara pengisian buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan dan buku administrasi pembangunan dengan baik.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang ditujukan untuk aparat kampung di Kampung Yakonde Distrik Waibu Kabupaten Jayapura telah didapatkan hasil sebagai berikut:

Pertama, Aparatur Kampung Yakonde, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura telah memahami dengan baik dan benar tentang administrasi pemerintahan kampung dan dapat mengisi ke dalam buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan, buku administrasi pembangunan sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. *Kedua*, telah tersedianya Buku Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa di Kampung Yakonde.

SARAN

Adapun saran yang diberikan kepada aparatur pemerintahan Kampung Yakonde Distrik Waibu Kabupaten Jayapura untuk dapat secara terus menerus melakukan pendataan sehingga pada saat mengisi data-data atau informasi ke dalam buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan dan buku administrasi pembangunan adalah data yang digunakan merupakan informasi yang terbaru. Sebab, dengan adanya informasi terbaru secara terus menerus maka diharapkan pelayanan kepada masyarakat di Kampung Yakonde dapat berjalan dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kampung Yakonde bersama aparaturnya atas dukungan dan partisipasinya selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengelola jurnal *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* yang di terbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Pahlawan, atas kesempatan yang diberikan dalam menerbitkan artikel pengabdian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrasyid, M.H., Rofieq, A., & Supriyanto, H. (2021). Pelatihan Pengelolaan Administrasi Desa. *Devosi*, 2(1), 19-23.
- Ilham, I., Muttaqin, U. I., & Idris, U. (2020). Pengembangan Bumkam Berbasis Potensi Lokal Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 104-109.
- Ilham, I., Renyaan, D., Sapioper, H. C., & Yumame, J. (2021). Edukasi Membudayakan Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(1), 12-23.
- Islami, Ulma. (2016). Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus Di Desa Tih Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang). Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Khumaidi, Nelli Fitri. 2020. "Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal". Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.

- Lalenoh, Nina. (2018) Aparatur desa belum pahami administrasi pertanahan di Papua Barat . Diunduh di : <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--aparatur-desa-belum-pahami-administrasi-pertanahan-di-papua-barat- tanggal 19 Maret 2023>
- Mouw, E., & Keradjaan, H. (2016). Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Studi Di Desa Wari Dan Wari Ino Kecamatan Tobelo. *Uniera*, 5(2), 19-25.
- Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- Pemprov Jawa Timur. (2019). Panduan Teknis Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Oleh Kecamatan. Biro Pemerintahan Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
- Pilo, R., Posumah, J.H., & Tulusan, F. (2022). Tata Kelola Administrasi Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 121,(8), 56-41.
- Renyaan, D., & Sriyono, S. (2020). Penataan Administrasi Umum Di Kampung Yoboi Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 307-311.
- Septiani, M. (2021). Pentingnya Tertib Administrasi Pada Pemerintahan Desa. Diunduh dari : <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pentingnya-tertib-administrasi-pada-pemerintahan-desa- Tanggal 19 Maret 2023>.
- Suryanti, M. S. D., Renyoet, C. C., Korwa, J. R., Gainau, A. W., Yumame, J., Ilham, I., ... & Idris, U. (2022). Edukasi Peduli Lingkungan Pada Pedagang Pasar Kaget Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 2158-2164.
- Yumame, J., Ilham, I., Renyaan, D., & Sapioper, H. (2020). MEMBANGUN KAMPUNG BERBASIS DATA (Pendampingan Penyusunan Monografi dan Profil Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 246-253.